

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Penelitian ini bertujuan memaparkan sejauh mana peranan elit lokal dalam mempengaruhi sistem pemerintahan desa terutama pada pemilihan kepala desa. Pelaksanaan demokrasi dalam politik di Indonesia tidak hanya berlangsung pada tingkat pemerintahan dipusat, akan tetapi pada tingkat pemerintahan yang berada distruktur desa (Mahpudin, 2019) . Pada tingkat desa, dinamika politik juga dapat diwujudkan pada perjalanan suatu desa dalam menentukan pemimpin yang berkuasa untuk menentukan perkembangan dan perubahan tatanan kehidupan desa menuju arah yang lebih baik dengan mewujudkan demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas yang dikelola oleh desa dan juga pemimpin desa sebagai suatu bentuk pemerintahan dilingkup desa (Alamsyah, 2016) . Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa kelembagaan desa terdapat dua spesifikasi yaitu pemerintahan dan pemerintah desa. Pemerintahan desa ialah penyelenggaran segala urusan pemerintahan dan masyarakat desa dalam sistem kenegaraan, sedangkan pemerintah desa ialah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggaran pemerintahan desa.

Pemilihan Kepala desa adalah pesta demokrasi untuk memilih kepala desa yang dapat diterima oleh mayoritas masyarakat desa dengan masa

periode tertentu (Amin, 2017). Setelah terpilih kepala desa sendiri akan menjalankan tugasnya selama 6 tahun kemudian desa akan melaksanakan pemilihan kembali untuk menentukan kepala desa terpilih (UU No 6, 2014). Pemilihan ini diharapkan mampu memberikan pemimpin terbaik yang lahir dari hasil pemilihan yang kredibel dan mempunyai kapasitas (Amin, 2017). Menurut Amin, pemilihan langsung kepala desa adalah bentuk implementasi demokrasi yang berdampak pada munculnya elit-elit di pedesaan..

Elit adalah sekelompok minoritas dalam masyarakat yang keputusannya bisa mempengaruhi masyarakat mayoritas (Mosca,1939). Dalam setiap masyarakat selalu terdapat dua kelas yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Menurut Mosca elit ini lahir karena naluriah manusia yang ingin berkuasa sehingga kekuatan politik harus di mobilisasi dengan membentuk dukungan kuat melahirkan satu pemimpin yang merupakan representatif dari suatu elit lokal. Lahirnya elit menurut (Sudrajat, 1993) bisa karena dasar keturunan, kekayaan dan pendidikan atau jabatan publik seperti kalangan politik, militer, dan jabatan publik lainnya Mengapa elit ini menjadi *concern* utama dalam penelitian ini? Elit lokal mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat, karena memiliki keistimewaan kuasa yang lebih besar di sektor ekonomi, pendidikan, agama dan sektor lain terkait kepentingan masyarakat umum (Keller, 1991). Dari kuasa tersebut maka elit mempunyai sumber daya yang cukup berdampak kepada orang banyak dan menciptakan ketergantungan sosial (Amin, 2017).

Dengan pengaruhnya yang cukup besar di masyarakat, elit lokal mampu mempengaruhi kebijakan publik yang ada, sehingga kebijakan publik lahir bukan karena kebutuhan masyarakat namun kepentingan kelompok minoritas tersebut untuk mengatur masyarakat umum (Mosca, 1939). Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Amin (2017) menjelaskan bahwa terjadi kesenjangan relasi sosial di Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di desa Rias pada tahun 2008 sejak pergantian kepala desa pembangunan desa hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat dan hanya segelintir itu pula yang dapat merasakan manfaatnya seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elit sosial lainnya.

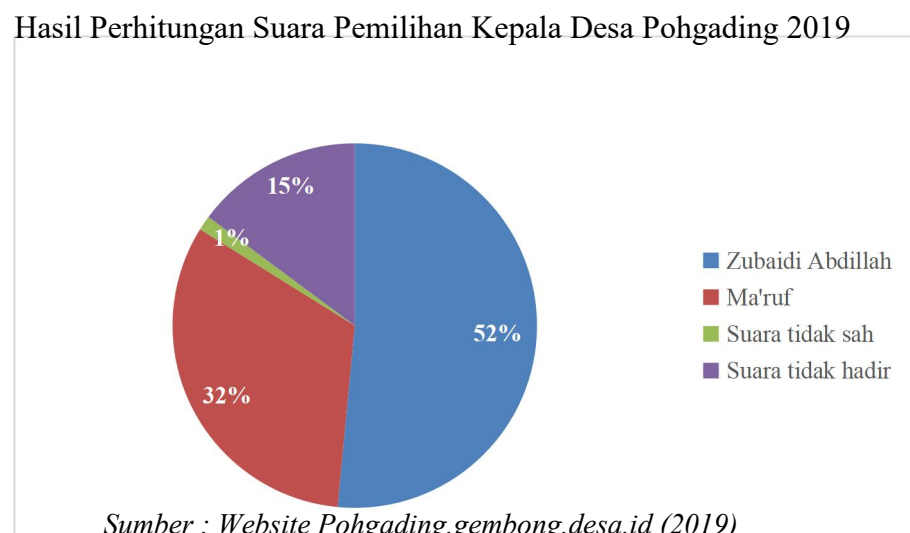
Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, elit sangat berperan penting dalam mempengaruhi pelaksanaan pemilihan bahwa ada kelompok-kelompok minoritas yang menggerakkan kelompok mayoritas untuk menjalankan kepentingan agar tercapai tujuan kelompok tersebut (Pramusinto, 2011) . Pramusinto kemudian menjelaskan lebih rinci bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di area publik, terdapat beberapa kelompok kepentingan tertentu yang menonjolkan kekuasaannya agar bisa terpilih daripada menonjolkan gagasan kepentingan bersama yang akan dibangun dalam sistem pemerintahan.

Salah satu fenomena diatas dijelaskan oleh Yusuf (2022) yang memaparkan jika pada pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Pati tahun 2019 telah menerapkan militerisasi dalam pemilihan Kepala Desa yakni keikut sertaannya eks militer dalam Pemilihan Kepala Desa, sehingga relasi

jabatan/kuasa sebagai anggota militer mampu mempengaruhi pemilihan tersebut . Hal ini sejalan dengan Sudrajat (1993) bahwa terdapat pengaruh dari jabatan, kekayaan, pendidikan, tokoh agama, bahkan militer yang bisa mempengaruhi masyarakat mayoritas dalam hal ini pemilihan kepala desa. Penelitian lain juga menyebutkan bawah ada fenomena *dinastiisme* yaitu lahirnya kepemimpinan di tingkat masyarakat yang berasal dari dominasi elit dari suatu keturunan yang bisa kita sebut elit ini lahir dari keturunan waris (Wawan, 2019).

Melihat fenomena yang terjadi dalam kontestasi politik desa dan pengaruh para elit maka peneliti hendak memaparkan tentang pemilihan Kepala Desa di Desa Pohgading, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Pada 12 Desember 2019 Desa Pohgading melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa yang diikuti oleh dua peserta yakni Zubaidi Abdillah dan Ma'ruf.

**Grafik 1.1**



Dari hasil pemilihan tersebut terdapat hasil bahwa ada 37 suara tidak sah, 419 suara tidak memilih. Kemudian Ma'ruf sebagai petahana memperoleh 914 suara dan Zubaidi Abdillah memperoleh 1455 suara. Dengan demikian pemilihan kepala desa pohgading dimenangkan oleh Zubaidi Abdillah ([Pohgading.gembong.desa.id](http://Pohgading.gembong.desa.id), 2019). Hal ini menjadi Unik karena Zubaidi memenangkan kontestasi pemilihan ini mengalahkan kepala desa sebelumnya dengan jumlah perolehan suara yang cukup jauh padahal dalam kontestasi politik petahan mempunyai peluang terpilih lebih besar daripada calon alternatif baru bukan karena riwayat kerja namun kuasa yang dibangun selama menjabat sehingga bisa mengatur citra riwayat pekerjaan bahkan masyarakat di wilayah tersebut. Maka peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh Zubaidi dalam memenangkan pemilihan kepala desa dan bagaimana Ma'ruf sebagai petahana tidak bisa terpilih untuk yang kedua kali.

Selama pemilihan kepala desa, masyarakat di Desa Pohgading terbagi menjadi dua kelompok politik pendukung yang dibagi berdasarkan afiliasi politiknya dan dimobilisasi oleh beberapa tokoh di masyarakat. Gerakan ini di prakarsai langsung elit lokal kedua calon dengan tujuan agar suara pendukung solid dan memperluas suara. Sejalan dengan hal ini, dalam penelitian Ainillah (2016) dijelaskan bahwa dalam setiap pemilihan kepala desa terdapat elite desa yang memberikan pengaruh dalam setiap kebijakan, penyelesaian permasalahan, ataupun kontestasi pemilihan kepala desa. Peran mereka sangatlah penting dalam menggiring masyarakat untuk menentukan

pilihan suara bahkan memberikan dukungan baik uang, tenaga dan ide dalam perumusan strategi pemenangan Pilkades (Ibid).

Adanya praktik menggunakan kekuatan materil baik berupa uang, massa atau kapasitas lainnya untuk mempengaruhi orang lain merupakan salah satu praktik politik praktis yang digunakan dalam mempengaruhi hasil dari sebuah keputusan agar selaras dengan kepentingan kelompok tersebut. (Keller, 1991). Pemilihan kepala desa merupakan ajang yang sarat akan potensi peran elit lokal dalam kontestasi Pilkades, karena masyarakat di wilayah desa mempunyai ikatan sosial yang tinggi dan memiliki berbagai level lapisan masyarakat baik tokoh agama, pejabat desa, tokoh publik, tokoh adat, tokoh organisasi, mempunyai pengaruh besar untuk intervensi arah suara masyarakat (Fadil et.al, 2018). Sehingga hak suara masyarakat untuk memilih calon yang sesuai dengan pilihan pribadi berubah menjadi politik balas budi, *vote buying*, bahkan unsur paksaan menjadi potensi besar terjadi di Pilkades karena masyarakat hidup dalam satu lingkungan yang sama (Averus & Alfina, 2020).

Kekuatan elit lokal yang terpusat pada satu calon Kepala Desa membuat lahirnya dinasti politik yang dapat bertahan lama dan mempengaruhi sistem pemerintahan desa untuk melanggengkan kekuasaan bahkan menguntungkan kelompok elit lainnya, Inilah sebabnya dalam Pilkades potensi pengaruh elit lokal juga bisa mendukung adanya politik dinast atau lahirnya elit lokal baru setelah yang lain tumbang (Sembiring & Khoiri, 2021). Dampak negatif yang di timbulkan dinasti politik dalam demokrasi, yaitu menghalangi partisipasi publik baik dalam pengambilan

kebijakan maupun pengisi jabatan strategis (Asako, Matsubayashi, & Ueda, 2015).

Maka dari itu penelitian ini ingin mengurai bagaimana pengaruh elit lokal dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan tahapan proses Pilkades pada Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang no 6 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan Pilkades dari tahap pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan. Dengan begitu kita dapat mengetahui sejauh mana peran elit politik, dampaknya bahkan apa saja peran mereka selama masa pemerintahan telah berlangsung. Sehingga penelitian ini bisa memberikan jawaban bagaimana menciptakan iklim demokrasi yang sehat pada Pilkades.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang pada penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam penelitian ini maka peneliti hendak meneliti bagaimana peran elit lokal dalam mempengaruhi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pohgading Kabupaten Pati tahun 2019 ?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran elit lokal dalam mempengaruhi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Pohgading

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini ialah mengetahui sejauh mana kemampuan peneliti dalam memahami peran elit politik dalam mempengaruhi demokrasi

pemilihan Kepala Desa. Manfaat lain dari penelitian ini ialah menjadikan pembelajaran dan pandangan dikemudian hari dalam pelaksanaan demokrasi pada pelaksanaan Pilkades.

## 1.5 STUDI TERDAHULU

Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan agar penelitian yang dilakukan peneliti ini bisa diterima secara original serta terhindar dari persepsi plagiat. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Nugroho (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa” menjelaskan bahwa desa merupakan wilayah yang otonom dan ada sebelum negara terbentuk. Hal ini dikarenakan desa memiliki *self-governing community*, dimana berhak mengatur maupun mengurus dirinya dengan menunjukkan keterbukaan ruang yang dimiliki pemerintah desa mendahulukan pembangunan ekonomi, sedangkan penguatan kelembagaan pemerintahan desa masih terpinggirkan sehingga perlu terciptanya sistem politik pemerintahan desa yang kredibel agar aparaturnya serta kepala desa memiliki kapasitas yang baik untuk membangun desa

Pebrianto (2021) kemudian menulis dalam penelitian “Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci)” bahwa pemilihan kepala desa walaupun bersifat demokratis juga harus menimbang kearifan lokal desa tersebut. Negara



berkewajiban melindungi dan memelihara adat istiadat tersebut mengingat dampak positif yang timbul karenanya dan asal usul terbentuknya kehidupan masyarakat sosial di desa tersebut. Walaupun demikian, pilkades harus tetap memperhatikan aturan nasional dan tetap menghargai hak-hak politik serta kewajiban politik warganya agar tidak mencoreng asas pemilu berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Untuk menciptakan iklim demokrasi yang baik di desa, Avenus & Alfina, (2020) menulis penelitian tentang “Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa” bahwa masyarakat desa mempunyai ikatan sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Ikatan sosial ini pula yang bertabrakan dengan kepentingan politik para calon kepala desa sehingga partisipasi masyarakat yang seharusnya lahir dari bentuk kesadaran mandiri tentang pentingnya suara mereka untuk memilih calon yang kredibel dan memiliki kapasitas yang baik berubah menjadi politik balas budi, kekeluargaan, politik uang, atau paksaan karena relasi yang sudah dekat tinggal di lingkungan sosial yang sama. Hal tersebut bisa terjadi akibat adanya campur tangan tokoh desa atau elit lokal yang mempengaruhi masyarakat lainnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Kemudian Fadil et.al (2018) dalam penelitian “Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015” . Hasil penelitian menunjukkan bahwa elit lokal berperan dalam peningkatan partisipasi pada Pilkada di Toraja Utara sesuai kapasitasnya. Elit lokal lokal mensosialisasikan

pasangan calon, menjadi tim kampanye dan tim relawan pasangan calon bupati/wakil bupati. Tokoh agama menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada dan mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada melalui kegiatan keagamaan. Tokoh adat berperan dengan memanfaatkan kharisma yang dimiliki mensosialisasikan informasi Pilkada kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan pasangan calon kemudian mendukungnya dalam Pilkada. Keterlibatan elit lokal dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2015 memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada bukan semata-mata karena keterlibatan elit lokal dalam mensosialisasikan informasi Pilkada. Akan tetapi terdapat faktor pendorong lain sehingga masyarakat aktif berpartisipasi, yaitu (1) diberikan imbalan materi dan (2) adanya sentimen keagamaan salah satu pasangan calon terhadap tokoh agama (pendeta) dalam kegiatan ibadah.

Hal ini selaras dengan Hasan et.al (2021) dalam penelitian yang berjudul “Perilaku Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Lolelamo Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur” bahwa sebagian besar pengetahuan masyarakat setempat dalam mengartikulasikan demokrasi hanya sekedar gambaran umum tentang konsep pemilihan kepala desa. Maka sangat diperlukan adanya edukasi mendalam tentang pengaruh elit lokal baik berbentuk *vote buying* atau tidak.

Noak (2021) dalam penelitian berjudul “Vote Buying dalam Pemilihan Kepala Desa dan Upaya Penangkalannya : Studi Kasus di Kabupaten

Tabanan” bahwa dalam praktik Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades regulasi sering kali bertabrakan dengan kondisi lokal masyarakat yang kadang sering melegalkan politik uang dan sering kali regulasi hanya menjadi instrumen formal Pilkades tanpa penindakan yang jelas. Terutama peran dari calon petahan yang bisa mempengaruhi panitia Pilkades akibat sistem pemerintah vertikal melalui pengaturan tugas pokok dan fungsi panitia pemilihan, yang menguntungkan calon petahana dan panitia cenderung abai untuk menindak.

Ahmad (2016) kemudian menuturkan dalam “Konflik Dinamika Politik Pedesaan (Studi Pada Pilkades di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB)” bahwa terjadinya konflik dalam pilkades di Kecamatan Sikur salah satunya disebabkan oleh beberapa faktor elit lokal yang membuat perpecahan di masyarakat sehingga masih terasa efek Pilkades tersebut hingga kepala desa yang baru telah menjabat tidak jauh dari nepotisme periode sebelumnya.

Dampak pengaruh elit lokal lokal ini dijelaskan oleh Sembiring & Khoiri (2021) berjudul “Relasi Elite, Sub-Elite, dan Masyarakat Desa dalam Mempertahankan Dinasti Keluarga Masra di Desa Gapurana Kabupaten Sumenep: Studi pada Rezim H. Andiwarto Tahun 2013-2019” menjelaskan relasi elite H. Andiwarto dengan sub-elite dan masyarakat desa dalam mempertahankan dinasti keluarga Masra untuk jabatan kepala desa. Dinasti keluarga Masra sudah berjalan sejak lama. Selama 150 tahun, keturunan keluarga Masra menduduki posisi kepala desa. Teori elite yang dikemukakan oleh Suzanne Keller digunakan untuk menganalisis relasi elite, sub-elite, dan masyarakat. Teori ini memiliki 4 (empat) indikator yaitu elite yang

memerintah, elite yang berkuasa, elite yang tidak berkuasa, dan masyarakat. Berdasarkan indikator tersebut maka relasi yang dibangun oleh H. Andiwarto terdiri dari tiga relasi yaitu relasi dengan elite politik, relasi dengan elite ekonomi, dan relasi dengan elite sosial.

Tamrin (2022) dalam penelitian berjudul “Sirkulasi Elit Politik di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang” menjelaskan pada pemilu 2019 ditemukan fenomena sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang kabupaten Pinrang orang-orang ikut mencalonkan menjadi anggota legislatif dan rata-rata para calon incumbent berhasil ditumbangkan sehingga memunculkan elit politik baru di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Adapun faktor yang mempengaruhi sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang diantaranya;a. Faktor Internal:1. Faktor finansial atau ekonomi,2. Faktor ketokohan,3. Faktor relasi atau modal sosial,b. Faktor Eksternal:1. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM),2. Media massa, dan 3. Perubahan dabil.

Namun kekuasaan elit politik lokal tidak selamanya bisa bertahan dalam kontestasi politik. Renaldi (2021) menjelaskan dalam penelitian berjudul “Dibalik Kekalahan Petahana: Narasi Politik dan Negosiasi Masyarakat” Kemenangan aktor dalam kontestasi Pilkada dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti trah/keluarga yang banyak, relasi yang baik dengan masyarakat serta dukungan dari tokoh masyarakat. Selain itu,praktik politik uang atau orang kuat lokal yang dimaknai sebagai bentuk negosiasi dari masyarakat karena absennya pemerintah dalam

penyediaan fasilitas publik yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat melatar belakangi kemungkinan besar kemenangan calon petahana. Namun pengaruh petahan atau elit lokal ini akan hilang jika masyarakatnya sudah tereduksi dan memiliki komunitas lokal secara komunal dan solid untuk saling mendukung satu sama lain tentang ide dan gagasan yang bisa mewakili masyarakat umum.

## **1.6 KERANGKA TEORI**

### **1.6.1 Elit Lokal**

Sampai saat ini, elit lokal masih relevan untuk dibahas karena dalam melihat kontestasi politik di arena publik. Menurut (Mosca, 1939) elit adalah sekelompok minoritas dalam masyarakat yang keputusannya bisa mempengaruhi masyarakat mayoritas. Kelas minoritas ini mempunyai kuasa untuk mempengaruhi politik, memonopoli kekuasaan dan cenderung mencari keuntungan dari setiap keputusan tersebut, dengan kata lain kepentingan bersama akan bersinggungan dengan kepentingan elit atau yang disebut mosca sebagai “kelas politik”.

Menurut Mosca, Minoritas yang terorganisir tersebut selalu memiliki sifat unggul daripada yang lainnya karena memiliki kekayaan, jabatan publik, kekuatan intimidasi sehingga bisa mengatur masyarakat. Selanjutnya, Mosca menulis konsepsi yang ia sebut sebagai “formula politik” dimana kaum elit ini selalu mencari pembenaran bahwa mereka layak memerintah suatu populasi dan

cenderung akan terus mempertahankan status elit politiknya baik dengan cara pewarisan atau memunculkan kekuatan baru.

*The first class, always the less numerous, performs all political functions, monopolizes power and enjoys the advantages that power brings, whereas the second, the more numerous class, is directed and controlled by the first.”* (Kelas pertama, untuk melakukan semua fungsi politik kelas pertama amat sedikit, memonopoli kekuasaan dan menikmati kelebihan yang dimilikinya, sedangkan kelas kedua merupakan mayoritas kelas yang dikendalikan oleh kelas pertama (Mosca, 1939). Selaras dengan Mosca, menurut (Shadily, 1980) elit merujuk pada suatu kelompok di masyarakat yang menempati kedudukan tinggi atau keistimewaan dalam mengatur masyarakat. Shadily kemudian memaparkan bahwa elit lahir bisa karena dasar keturunan, kekayaan dan pendidikan atau jabatan publik seperti kalangan politik, militer, dan jabatan publik lainnya.

Kemudian menurut (Keller, 1991), elit diartikan sebagai orang-orang pilihan yang mempunyai posisi tinggi di masyarakat yang mempunyai kelebihan daripada masyarakat lainnya. Elit menurut Suzzana Keller berasal dari kata *elligere*, yang berarti memilih. Keller berpendapat terdapat beberapa individu yang memiliki pengaruh dan peranan yang kuat, yang selanjutnya disebut elit. Secara umum, elit diartikan sebagai sekelompok individu dalam masyarakat yang menempati posisi-posisi tertinggi.

Seperti Mosca, Suzanne Keller juga memperjelas bahwa elit sebagai minoritas yang mengatur masyarakat kolektif dan merasa mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Menurut (Keller, 1963) elit mempunyai banyak keunggulan daripada masyarakat umum yaitu :

1. Posisi yang mereka duduki merupakan posisi sentral, baik jabatan politik, ekonomi, militer atau keagamaan
2. Memiliki keunggulan baik intelektual, materil, keberanian, atau kepercayaan
3. Memiliki peran yang besar daripada masyarakat lainnya
4. Memiliki imbalan yang besar atas kebijakan publik

Setiap elit ini juga terbagi menurut diferensiasi menurut kemampuan mereka masing-masing baik elit agama, militer, ekonomi, intelektual, politik yang terstruktur dan bisa menjadi penghubung masyarakat dengan elit lainnya (Keller, 1991). Keller juga menyebut bahwa elit ini juga terjadi karena kompetensi perseorangan yang menyingkirkan elit lainnya yang mempunyai kemampuan yang sama bahkan berbeda. Namun kelompok elit ini pula yang saling berkompetensi agar tidak kehilangan pengaruhnya maka agar tetap berkuasa elit harus melindungi kepentingan dan memperkuat kekuasaanya di masyarakat atau bisa disebut “elit akan berkembang sesuai dengan situasi zaman” (Keller, 1991).

Secara garis besar, Suzanne Keller membagi elit kedalam dua golongan yaitu elit formal (governing elit) dan elit strategis (non governing elit). Elit penguasa merupakan elit yang memiliki kekuasaan secara formal di ranah publik sedangkan elit strategis memiliki kekuasaan berada di luar jabatan formal publik namun berpengaruh terhadap *rulling class* di sektor ekonomi, pendidikan, agama dan sektor lain berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum (Keller, 1963). Elit strategis ini mempunyai *power* untuk mempengaruhi elit penguasa dalam merespon suatu kebijakan publik yang sering sekali disamakan dengan kepentingan mereka, sebagai timbalik balik elit penguasa mempunyai dukungan kekuasaan yang semakin besar dari elit strategis karena Keller menyebutkan bahwa elit strategis ini cenderung mempunyai kekuasaan yang relatif stabil bahkan bisa ikut serta menjadi elit penguasa atau oligarki (Keller, 1991).

Menurut Keller (1991), elit politik bisa mendapatkan kekuasaan yang terbentuk dari proses panjang sejarah dalam keikutsertaan sejak membentuk sistem pemerintahan atau terpilihnya penguasa baru dan membentuk legitimasi atas kelompok tersebut. Untuk melihat sejauh mana peran elit politik ini dalam sistem pemerintahan baik itu elit formal dan elit startegis, Keller membuat model tolak ukur peran elit politik dalam beberapa tahapan yaitu :



### 1. Keterlibatan Aktor/Elit Politik

Untuk melihat peran elit politik dalam sistem pemerintahan, maka perlu diukur aktor pencalonan elit formal di pemerintahan dan elit strategis. Elit strategis mempunyai peran memberikan dukungan baik ide dan materil agar kepentingan dapat disalurkan dalam bentuk kebijakan yang akan dibuat kedepan. Dalam tahap ini perlu mendalami tokoh dan golongan yang terlibat kemudian mendalami apa saja bentuk kontribusi setiap aktor tersebut. Disini petahana juga mempunyai peran besar bagaimana pengaruh yang dibelikan atau bagaimana pengaruh dinasti politik terhadap kekuasaan selanjutnya

### 2. Sumber Daya

Melihat bentuk kontribusi yang diberikan baik berupa ide, materil ataupun tenaga. Modal ini merupakan pokok sumber legitimasi setiap elit dalam mempengaruhi kebijakan publik yang ada. Semakin besar modal/kontribusi semakin besar pengaruh elit lokal tersebut dalam mencapai jabatan pada struktur masyarakat.

### 3. Pengaruh Elit Kepada Masyarakat

Melihat sejauh mana pengaruh elit dalam mempengaruhi suara masyarakat. Apakah dari modal dan strategi yang dimiliki bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat dan masyarakat (mayoritas) bisa mengikuti kepentingan yang dibuat oleh aktor

elit (minoritas). Alokasi sumber daya menjadi pembahasan penting bagaimana sumber daya yang dimiliki bisa dimobilisasi dalam proses politik. Dalam mobilisasi kekuasaan tersebut polarisasi masyarakat, kekuatan pendukung (relawan) dan konflik elit akan bersinggungan.

#### 4. Mobilisasi Kekuasaan

Mobilisasi kekuasaan ini berupa relasi yang dibangun dengan aktor pejabat pemerintah saat ini. Terutama pasca elit formal (pejabat pemerintahan) baru berhasil menduduki jabatan formal tersebut. Apa saja pengaruh yang berhasil didapatkan atau relasi kekuasaan antar keduanya.

Dalam masyarakat di tingkat desa, elit ini sangat relevan menjadi pembahasan karena desa mempunyai struktur pemerintahan yang berlaku namun relasi kekuasaan tersebut juga terjadi dengan elit strategis desa (Erlina, 2019) bahwa dalam suatu kelompok masyarakat pasti terdapat elit penguasa, elit strategis dan yang diatur. Kenyataan naluriah kekuasaan dimana ada kecenderungan untuk berkuasa ini pula yang akan menguraikan bagaimana suatu sistem kekuasaan mulai dari pemilihan kepemimpinan hingga jalannya pembangunan akan begitu lekat dengan praktik-praktik elit (Mosca, 1939).

### 1.6.2 Peran

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2003), menjelaskan pengertian peranan

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Sedangkan peran ideal menurut Soejono Soekanto, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya Kepala Desa yang kedudukannya sebagai pimpinan pemerintahan desa berperan menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang Desa, 2014). Begitupula masyarakat yang idelannya memiliki peran mewujudkan politik elektoral yang berkualitas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang

dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Syaratperan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

### **1.6.3 Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Desa**

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi untuk keperluan pengurusan masyarakat tersebut tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya pemerintahan desa.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permen no 113 tahun 2014). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan peran tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undangundang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerinta desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Penyelenggaran Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi

sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan perangkat desa, mengadakan pengawasan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat jabatan perangkat desa (Sugiman, 2018).

Kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem Pemerintahan Desa selain dari pada BPD. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian didalam Pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, 35 ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun (Tahririah, 2016).

Pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Adapun tahapan dari pemilihan Kepala Desa ialah : 1)

Tahapan pencalonan. 2) Tahapan pemilihan. 3) Tahapan perhitungan suara pemilihan (Huda, 2015 ).

## **1.7 DEFINISI KONSEPTUAL**

### **1.7.1 Elit Politik**

Elit politik merupakan kelompok minoritas dalam lingkup masyarakat yang mempunyai kekuasaan dalam mengatur masyarakat luas karena memiliki kekayaan, jabatan atau pengaruh besar di arena publik serta mempunyai kepentingan-kepentingan kelompok yang dapat diterapkan dalam kebijakan publik.

### **1.7.2 Peran**

Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

### **1.7.3 Pemerintah Desa dan Pemilihan Kepala Desa**

Pemerintah desa merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan ditingkat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dipilih berdasarkan pemilihan umum oleh masyarakat desa.



## 1.8 DEFINISI OPERASIONAL

Berdasarkan topik penelitian terkait elit politik yang terdapat pada Pilkades di Desa Pohgading, maka peneliti menetapkan definisi operasional penelitian merujuk pada teori Suzanne Keller (1991) untuk melihat peran elit formal dan elit startegis dalam proses Pilkades sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
Definisi Operasional Penelitian

<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
Keterlibatan aktor/elit politik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tokoh-tokoh dibalik kedua kandidat</li><li>2. Bentuk kontribusi elit politik dalam pencalonan</li><li>3. Pengaruh petahana dalam pencalonan</li></ol>
Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bentuk modal yang diberikan kepada kedua calon</li><li>2. Adanya alokasi ke masyarakat</li><li>3. Startegi kampanye ke masyarakat</li></ol>
Pengaruh elit kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Upaya elit lokal dalam pemenangan calon Kades</li><li>2. Dinamika elit lokal</li></ol>
Mobilisasi kekuasaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Relasi kuasa yang dibangun calon terpilih dengan elit lokal</li><li>2. Konflik elit lokal dengan kandidat terpilih</li></ol>

(Keller, 1991)

## **1.9 METODE PENELITIAN**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Penulisan proposal penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan sifat dari fenomena serta gejala yang membahas tentang perkembangan hubungan objek penelitian dengan aspek sosial di masyarakat (Surachmad, 1982). Metode ini memiliki karakteristik yang membutuhkan konsentrasi pada penyusunan masalah di penulisan dengan menyertakan pengumpulan data yang diatur, dijelaskan, dan dianalisis secara intensif dan terperinci (Nurmandi & Purnomo, 2011) . Manfaat analisis kualitatif bertujuan agar dapat memahami, memaknai, dan mendefinisikan hubungan perbandingan antar gejala sosial yang saling berhubungan (Martono, 2011).

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi pada Desa Pohgading, Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini karena desa pohgading pada tahun 2019 lalu telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh dua peserta Pilkades. Dalam pemilihan tersebut, posisi Kepala Desa dimenangkan oleh calon non petahana. Dalam pelaksanaannya banyak aktor politik yang terlibat sehingga peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh elit politik terutama elit politik

lokal dalam konstestasi Pilkades yang dilakukan di desa tersebut bisa mempengaruhi suara masyarakat.

### **1.9.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Adapun data primer pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara dan hasil observasi, sedangkan data sekunder dari penelitian ini ialah data yang berasal dari studi dokumentasi.

### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 teknik wawancara, yakni :

#### **1. Teknik Wawancara**

Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam penelitian ini dengan melakukan tanya jawab kepada pihak Kepala Desa Pohgading selaku objek dari penelitian. Tidak hanya itu peneliti juga melakukan wawancara bersama masyarakat sebagai pemilih dalam Pilkades di Desa Pohgading. terkait rincian pertanyaan dalam wawancara sebagai teknik pengumpulan data penelitian, maka peneliti menetapkan narasumber wawancara ialah Zubaidi Abdillah (Kepala Desa terpilih), Ma'ruf, ketua tim pemenangan kedua kandidat, Kepala Dukuh, ketua panitia pemilihan. Melalui teknik wawancara ini maka peneliti akan mendapatkan jawaban

konkret dari sisi artsipan atas hadirnya dinamika politik dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Pohgading.

Wawancara ini menggunakan pendekatan *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* (Sugiyono, 2012) artinya peneliti akan melakukan wawancara kepada orang yang dianggap paling tahu dan menguasai topik yang diteliti serta wawancara ini akan terbuka dari satu sumber ke sumber lainnya untuk melengkapi data hasil wawancara.

## 2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (Triono, 2019).

## 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki data seperti dari dokumen-dokumen, catatan, berita, file, atau hal-hal lain terkait pemilihan desa di Desa Pohgading yang sudah di

dokumentasikan pihak Desa Pohgading sebagai pelengkap data penelitian.

#### **1.9.5 Teknik Analisa Data**

Adapun teknik lain yang dapat di gunakan dalam analisis data pada penelitian ini ialah teknik triangulasi yang memiliki sistem analisa data berupa :

##### **1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan penyaringan data-data kasar yang di temukan oleh peneliti baik di lapangan ataupun melalui penelitian sbelumnya agar memudahkan penulis dalam melakukan ringkasan dan pelaksanaan analisis sehingga penulis mendapatkan data akurat yang pantas untuk di tampilkan dalam penelitian ini. Bentuk analisis ini mampu menajamkan , menggolongkan, memilah sedemikian rupa untuk mendapatkan penarikan hasil yang akurat dan dapat diverifikasi. Data kualitatif yang di hasilkan dari reduksi ini akan lebih mudah untuk disederhanakan dan transformasikan melalui berbagai macam cara, yaitu : seleksi, penggolongan, ringkasan agar mendapatkan hasil yang singkat dengan satu pola yang luas.

##### **2. Penyajian data**

Setelah peneliti mengumpulkan data dan menyeleksi data yang di dapatkan, maka penulis melakukan penyajian data sesuai dengan kebutuhan penelitian agar tidak menampilkan kelebihan data yang mampu menimbulkan kerumitan analisa atau bahkan kekurangan data yang menyebabkan kurang relevan dan akuratnya penelitian tersebut sebab minimnya fakta di lapangan.

### 3. Matriks kesimpulan

Matriks kesimpulan merupakan penarikan benang merah yang penulis dapatkan dari perolehan data. Pada tahap ini penulis dapat membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang dapat menunjang permasalahan dalam penelitian ini mengingat terdapat beberapa rumusan masalah yang harus di selesaikan melalui pencarian jalan keluar dari hal-hal yang di jadikan perhatian dalam penelitian ini.